

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu cerminan dari berkembang atau tidaknya pembangunan dan kesejahteraan di satu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Jonaidi, 2012; Nuraini, 2017). Laju pertumbuhan ekonomi seringkali ditujukan dengan peningkatan sektor produksi barang ataupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan ekonomi negara.

Pertumbuhan ekonomi pun menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan penambahan pendapatan bagi masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi, yang sering diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan PDB juga memberikan kesempatan bagi negara untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan produktivitas dan daya saing (Hudiyanto, 2015).

Mencermati tentang pertumbuhan ekonomi nasional, tentunya perlu adanya perbandingan antara pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain. Sehingga pemerintah Indonesia dapat bercermin sudah sejauh dan setinggi apa pertumbuhan ekonomi Indonesia di skala global.



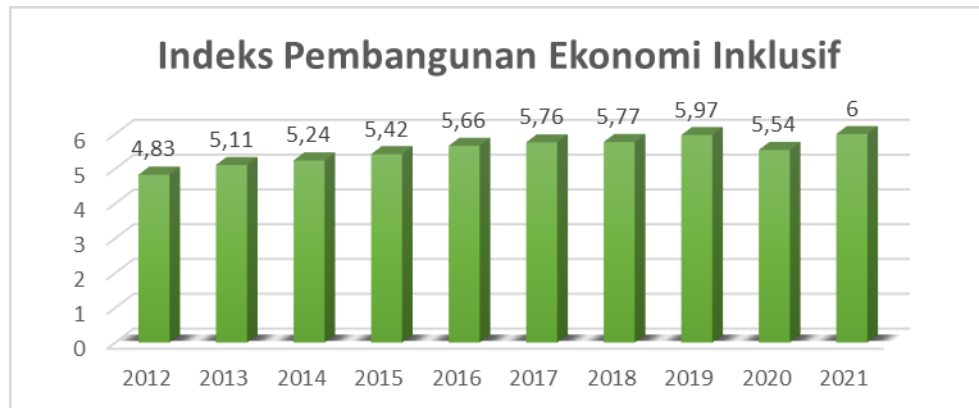
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN Tahun 2022

Apabila melihat tingkat pertumbuhan ekonomi di atas, maka Indonesia berada di peringkat 4 (empat) dengan presentase pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara-negara Asean. Sedangkan negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kawasan Asean dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,7%, diikuti Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi 8.02%, Filipina sebesar 7.6% (Annur, 2023).

Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap aspek keberlanjutan dan distribusi yang adil agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Firmanzah, 2014).

Menurut Prasetyo, pertumbuhan yang baik tidak hanya dilihat dari segi kuantitas atau seberapa banyak jumlah output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Pertumbuhan yang baik perlu mencakup banyak aspek, seperti pembangunan ekonomi yang merata, hilangnya ketimpangan, turunnya kemiskinan, dan perluasan akses serta kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat (Prasetyo, 2008). Selain Produk Domestik Bruto (PDB) yang biasanya digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) juga dapat digunakan untuk pengukuran pertumbuhan ekonomi berkualitas.



Sumber: Bappenas, 2022

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 2012 – 2021

Pada tahun 2021 tingkat indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) nasional menyentuh kembali ke angka tertingginya selama 10 tahun terakhir, yaitu dengan skor 6 . Sebelumnya di tahun 2018 dan 2019 IPEI Indonesia mencapai angka tertinggi bila dibandingkan tahun sesudahnya, yaitu 5,77 dan 5,97 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Hal ini tentu menjadi parameter bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara lebih merata dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi bilamana dilihat dari segi kuantitas saja, tanpa melihat bagaimana sektor ekonomi tumbuh dengan berkualitas, maka perekonomian seperti ini sangat rentan (Azzahra, et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan bagaimana ekonomi nasional bukan hanya dilihat dari faktor produksi saja, tetapi diperhatikan juga bagaimana ekonomi dapat bertumbuh secara berkualitas dan inklusif (*Quality Economic Growth*) (Prasetyo, 2008). Ekonomi yang mengedepankan kualitas merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Handoko, 2001).

Dalam Islam sendiri, ekonomi tidak hanya dipandang dari sisi materialistik saja, tetapi juga merupakan kegiatan manusia yang mendorong perkembangan material dan spiritual manusia (At-Tariqi, 2004). Sesuai dengan tujuan utamanya,

Islam tidak memandang peningkatan pendapatan sebagai sesuatu yang terpisah dari distribusi (pemerataan), seruan keadilan, dan kesetaraan sosial ekonomi (Chapra, 2000). Dalam al Qur'an terdapat juga ayat yang menjelaskan tentang keadilan dan kesetaraan ekonomi, yaitu QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

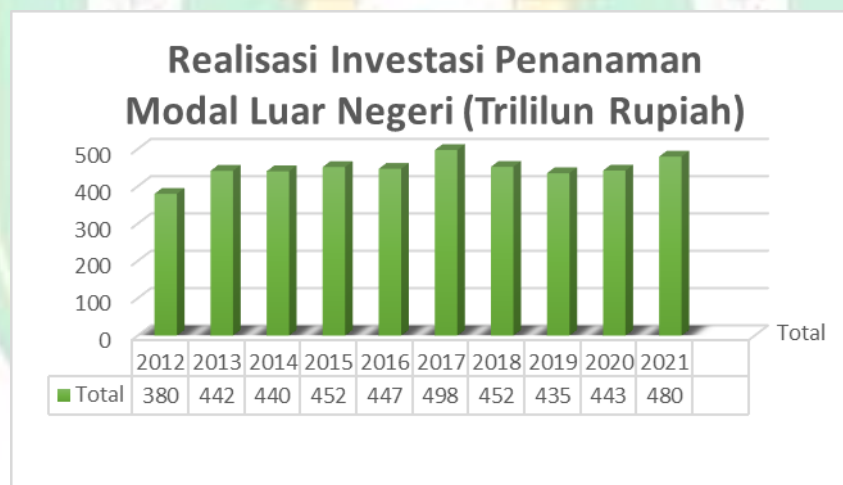
Oleh karena itu, melalui ayat di atas, Islam mengajarkan bahwasannya harus adanya distribusi ekonomi yang baik, sehingga nantinya tercipta roda perekonomian yang berprinsip keadilan, kesetaraan, dan merata bagi masyarakat.

Menurut Todaro, ada tiga indikator utama yang dinilai mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu *Technological progress* (Kemajuan teknologi), *Growth In Population* (Pertumbuhan Penduduk), *Capital accumulation* (akumulasi modal) (Todaro, et al., 2006). Aliran modal dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan investasi dapat berdampak pada kemajuan ekonomi suatu negara. Ketika dana beredar melalui suatu perekonomian, kegiatan ekonomi yang tadinya tidak efektif dapat menjadi lebih efektif dan meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu negara. Pemasukan modal ini akan menghasilkan pertumbuhan output yang stabil bagi perekonomian Indonesia, yang memungkinkan negara ini untuk menghasilkan barang dan jasa sendiri dan dapat bersaing dalam era globalisasi yang cepat dan sempit.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan aliran modal masuk ke negara. Salah satu kebijakan yang diterapkan ialah terkait investasi asing (*Foreign Direct Investment*). Undang-undang (UU) Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 berisi tentang tujuan dari diizinkan berinvestasi, baik itu penanaman modal dalam negeri (PMDN)

maupun penanaman modal luar negeri (PMLU) yang tidak lain berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Sukirno, 2000).

Oleh karena itu, *Foreign Direct Investment* atau Investasi asing langsung secara sah telah tercantum dalam Undang-undang negara republik Indonesia, menandakan bahwa Indonesia menerima penanaman modal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia (Sukirno, 2000; Putra, Suyanto, & Radjamin, 2019). Investasi asing masuk sebagai indikator modal dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan semakin besarnya modal yang ditanamkan oleh investor, maka sektor produksi dapat meningkatkan output produksinya. Selain itu, peningkatan output ekonomi, harus dibarengi dengan peningkatan dalam pembangunan sumber daya insani, dan juga mendorong ekonomi tumbuh secara berkualitas, sehingga masyarakat secara luas dapat merasakan manfaatnya (Firmanzah, 2014). Menurut data dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah investasi asing menanamkan modalnya ke Indonesia tahun 2012 – 2021, sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.2 Jumlah Investasi Asing di Indonesia Tahun 2012 – 2021

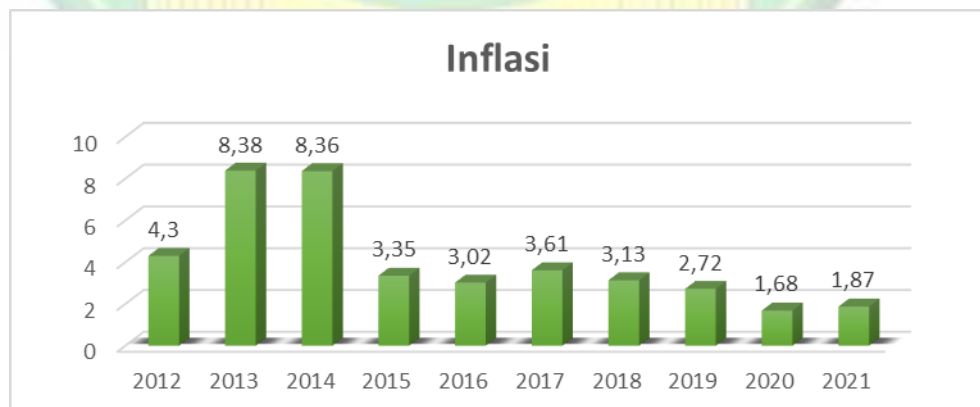
Berdasarkan gambar 1.2. Kementerian Investasi/BKPM melaporkan, realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia senilai Rp 480 triliun pada 2021. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada 2020 yang hanya sebesar Rp 443 triliun (Rizaty, 2023).

Terjadinya peningkatan dalam jumlah investasi asing yang menyalurkan modalnya ke Indonesia tentu saja dapat mendorong pembangunan ekonomi

nasional. Bila dilihat dari sisi makroekonomi, investasi memiliki andil dalam unsur pembentuk pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi dalam kaitannya dengan pendapatan nasional memiliki hubungan yang positif; jika investasi meningkat, PDB tumbuh, dan Adapun sebaliknya bila investasi mengalami penurunan, PDB juga ikut menurun (Sugiarto, 2019; Makun, 2018).

Bila disatu sisi investasi mengalami kenaikan, maka disisi lain semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena bisa saja terjadi ketidakstabilan nilai inflasi yang mengalami kenaikan. Inflasi dapat menjadi ancaman terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi jika tidak terkendali. Kenaikan harga dapat mengurangi daya beli konsumen dan mengurangi keuntungan perusahaan, menyebabkan penurunan investasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang cermat diperlukan untuk menjaga inflasi tetap stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat juga dapat membantu mengendalikan inflasi dengan menciptakan permintaan yang stabil untuk barang dan jasa (Banna, et al., 2023).

Ketahanan stabilitas ekonomi menjadi peran penting dalam pertumbuhan ekonomi berkualitas (Marlinah, 2017). Inflasi menjadi tanda ketahanan ekonomi di suatu negara, bagaimana perekonomian mampu menstabilkan tingkat inflasi pada periode tertentu dan bagaimana perekonomian tetap berjalan dengan situasi inflasi yang fluktuatif (Salim, et al., 2021). Menurut data dari Badan Pusat Statistik tentang tingkat inflasi Indonesia tahun 2012 – 2021, sebagai berikut:



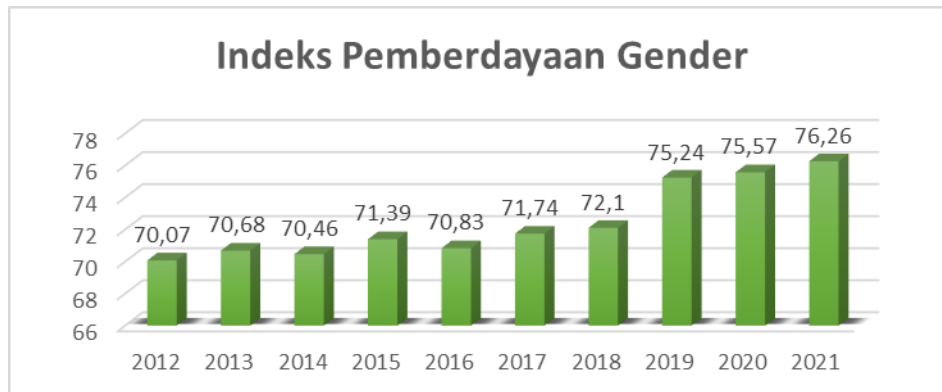
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.3 Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2012 – 2021

Pada tahun 2021 tingkat inflasi nasional menyentuh angka yang relatif rendah, yaitu 1,87% . Sebelumnya di tahun 2013 dan 2014 tingkat inflasi Indonesia mencapai angka tertinggi bila dibandingkan tahun sesudahnya, yaitu 8,38% dan 8,36% (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini tentu menjadi peringatan bagi pemerintah dalam upaya mengendalikan tingginya harga-harga barang.

Menurut Bank Indonesia, inflasi relatif rendah diperlukan untuk perekonomian jangka panjang, yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi penting karena bilamana inflasi di suatu wilayah sangat tinggi dan cenderung tidak stabil, maka akan memberikan pengaruh buruk terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus menurun sehingga menurunkan standar hidup masyarakat dan pada akhirnya membuat masyarakat semakin miskin, terutama masyarakat miskin. Kedua, inflasi yang berfluktuasi akan menyulitkan para pelaku ekonomi untuk membuat keputusan (Bank Indonesia, 2023).

Sedangkan untuk isu pembangunan sumber daya insani guna mencapai *quality economic growth* (Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas) masih ada permasalahan yang dihadapi, terutama tentang sejauh mana peran perempuan dalam sektor ekonomi ? Hal ini tentu menjadi salah satu fokus dalam penelitian, dimana ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan bagi kaum hawa dalam ikut serta berkontribusi di sektor ekonomi (Arif, 2018; Fahrudin Alfana, et al., 2015). Sebagaimana diketahui bahwa dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat menginginkan untuk tidak ada ketimpangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah perihal ketimpangan gender, karena dengan mengesampingkan peran perempuan dalam ekonomi, akan merugikan ekonomi suatu negara sebab tidak dapat mengoptimalkan aspek sumber daya manusia (Agénor, et al., 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

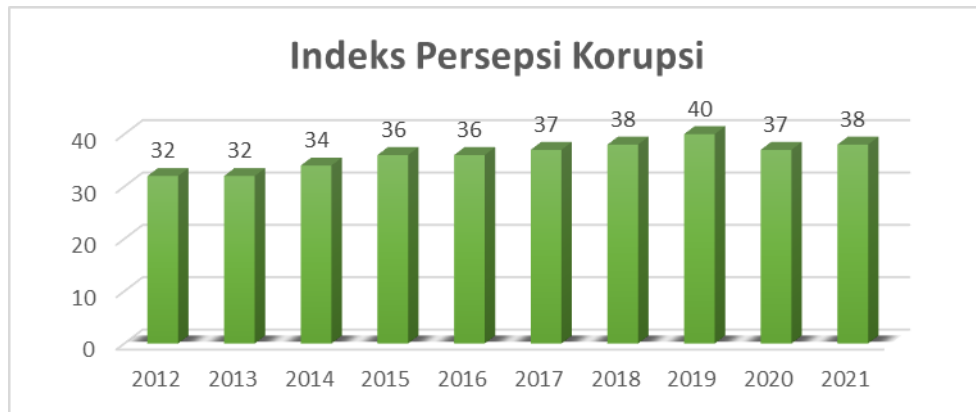
Gambar 1.4 Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia Tahun 2012 – 2021

Berdasarkan gambar 1.5. Indikator kesetaraan gender di atas menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir indeks pemberdayaan gender di Indonesia mengalami tren yang positif, pada tahun 2021 mencapai angka tertingginya, mendapatkan skor 76,26 yang menandakan sudah ada perbaikan dalam kesetaraan gender di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022).

Meski indeks pemberdayaan gender terus meningkat, pemerintah harus terus memperhatikan peran perempuan khususnya di sektor ekonomi. Hal ini untuk menghapus ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Ketidaksetaraan gender mengurangi produksi, efisiensi, dan kemajuan ekonomi. Diskriminasi gender mengurangi aktivitas perekonomian dan menurunkan standar hidup manusia, serta mengucilkan perempuan dan laki-laki dari akses terhadap sumber daya, layanan politik, dan peluang kerja (Pertiwi, et al., 2021; World Bank, 2005).

Selain pentingnya kesetaraan gender yang ingin dicapai dalam suatu negara untuk mendorong peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Pertumbuhan yang berkualitas juga memerlukan pembangunan ekonomi yang merata ke semua lapisan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur serta pusat kegiatan ekonomi, sarana pendidikan yang unggul di setiap daerah, dan akses layanan kesehatan yang merata untuk masyarakat. Semua itu bisa tercapai dengan distribusi anggaran pembangunan yang baik dan berkeadilan (Haqiqi, et al., 2020).

Sedangkan di Indonesia sendiri, distribusi anggaran negara masih rentan di salah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dalam hal ini di korupsi. Apabila melihat data indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir sebagai berikut :



Sumber: *Transparency International Indonesia, 2022*

Gambar 1.5 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012 – 2021

Berdasarkan Gambar 1.4. Menurut laporan *Transparency International*, rata-rata IPK global adalah 43, sedangkan Indonesia adalah 38. Oleh karena itu, indeks korupsi Indonesia lebih rendah dari rata-rata global. Myanmar memiliki tingkat korupsi tertinggi di ASEAN, kemudian diikuti oleh Kamboja, Laos, dan Filipina.

Sedangkan permasalahan korupsi di Indonesia masih sangat buruk berdasarkan indeks persepsi korupsi. Korupsi sendiri ialah kejahatan serius karena menyangkut kepentingan negara, dimana mengambil uang negara yang digunakan untuk keuntungan pribadi atau sektoral, yang semestinya dipakai untuk kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan telah merosot, jiwa kemanusiaan telah melemah, dan kejahatan akan terus tumbuh subur tanpa mempedulikan nilai-nilai ketuhanan. Melalui indeks persepsi korupsi yang baik, maka dana negara untuk melaksanakan pembangunan nasional dapat optimal, dan tentu pertumbuhan ekonomi akan semakin berkualitas. Menurut Lutfi, Zainuri, dan Diartha, Dampak dari korupsi ialah inefisiensi pengelolaan produksi dan misalokasi sumber daya (Lutfi, et al., 2020).

Berdasarkan runtutan permasalahan di atas, maka dapat diambil garis besar bahwa terdapat banyak sekali permasalahan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*Quality Economic Growth*). Disamping itu, isu-isu yang menjadi bagian dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin pada variabel, seperti FDI, Inflasi, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Persepsi Korupsi menjadi faktor pendorong untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan menganalisis lebih lanjut isu-isu yang telah disebutkan di atas, serta menarik kesimpulan dalam pembentuk pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia. Peneliti juga akan menganalisis dan mengidentifikasi sejauh mana peluang perbaikan dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*Quality Economic Growth*).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan skripsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung stagnan dari 10 tahun terakhir, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,02%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kemerosotan yang sangat signifikan, yaitu -2,07%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali diangkat 3,70%. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 5,31%. Artinya laju pertumbuhan ekonomi nasional stagnan diangka 3,70 – 5,31%
2. Capaian pembangunan manusia Indonesia di bidang kesetaraan gender semakin menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari data skor indeks pemberdayaan gender (IDG) di tanah air yang terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, skor IDG nasional sebesar 76.26 poin pada 2021. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 75.57.
3. Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2021 senilai Rp. 480 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 443 triliun.
4. *Global Gap Gender Report (GGGR)* tahun 2021 dari *World Economy Report (WEF)* menunjukkan ketimpangan gender negara-negara di dunia. Nilai GGGI Indonesia sebesar 68,8 persen artinya baru 68,8 persen

kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Peringkat Indonesia adalah 7 dari 10 negara Asia Tenggara berdasarkan nilai GGGI.

5. Inflasi di Indonesia pada tahun 2022 dengan presentase 5,51% ini lebih tinggi, jika dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sebesar 1,87%.
6. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2021 mengalami kenaikan 1 angka. Dengan skor 38, hasil ini mencerminkan penanganan kasus korupsi di Indonesia masih buruk.
7. Rata-rata IPK Indonesia masih sangat buruk, bahkan dibawah rata-rata IPK global yang sebesar 43.

C. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas, peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun terdapat 2 (dua) variabel yang akan peneliti gunakan, yaitu variabel dependent (terikat) menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dan variabel independent (bebas) menggunakan variabel *foreign direct investment*, inflasi, indeks pemberdayaan gender, dan Indeks Persepsi Korupsi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Foreign Direct Investment* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia.
2. Bagaimana Inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia.
3. Bagaimana Indeks Pemberdayaan Gender mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia.
4. Bagaimana Indeks Persepsi Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia.
5. Bagaimana *Foreign Direct Investment*, Inflasi, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Persepsi Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Foreign Direct Investment*, Inflasi, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi serta menambah Ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami keilmuan tentang Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Ekonomi Syari'ah yang terkait dengan judul "Faktor-faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas di Indonesia".

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan instansi pemerintahan dapat menganalisis dan mengetahui bagaimana tingkat pengaruh foreign direct investment, inflasi, kesetaraan gender dan indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia pada periode 2012 – 2021. Informasi ini sebagai bahan masukan bagi instansi suatu pemerintahan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*Quality Economic Growth*).

b) Bagi Akademisi

Menambah khasanah informasi dan pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam menentukan tinggi rendahnya pengaruh variabel *foreign direct investment*, inflasi, indeks Pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan indeks korupsi tersebut khususnya dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*Quality Economic Growth*) di Indonesia.

c) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengaruh variabel *foreign direct investment*, inflasi, indeks Pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan Strata 1 Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca jika skema yang ditempuh jelas dan mengarah sesuai tujuan.

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA:

Bab ini menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi teori *Foreign Direct Investment*, Inflasi, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Persepsi Korupsi hingga Pertumbuhan Ekonomi Berualitas, Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN:

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, mulai dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pembahasan mengenai bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment*, Inflasi, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi,.

BAB V PENUTUP:

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapatkan serta memberikan saran untuk pengembangan objek penelitian selanjutnya

